

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya pembangunan nasional di negara-negara berkembang difokuskan pada pembangunan ekonomi dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan keberhasilan tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah atau Negara. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila tingkat laju pertumbuhan ekonomi disuatu Negara lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduknya. Akibatnya, ketimpangan pendapatan masyarakat semakin kecil dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Sehingga pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah berupaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi (Gosal et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Keberhasilan pembangunan disuatu daerah dapat dilihat dari

tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya (Tuwo et al., 2021).

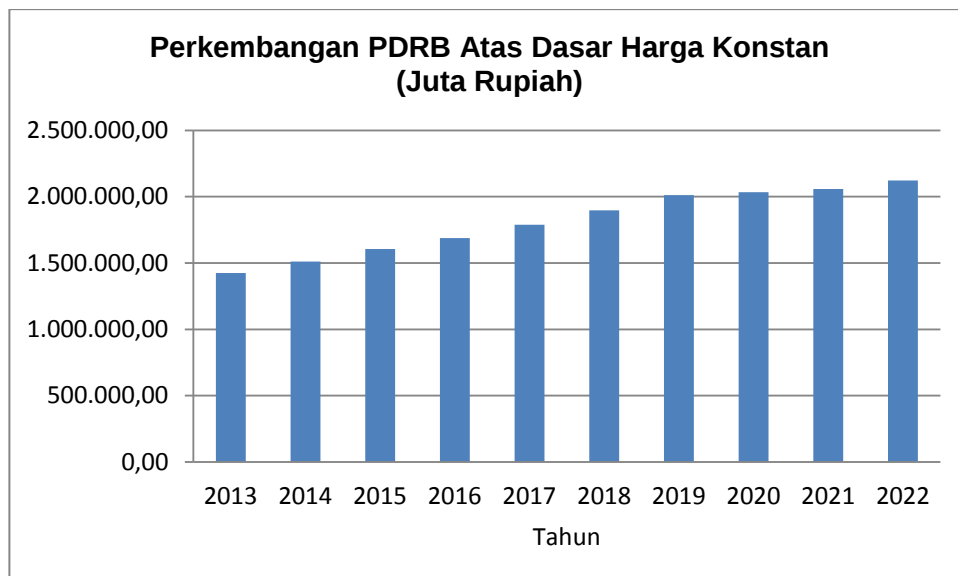
Salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah karena perubahan kondisi ekonomi secara terus-menerus menuju arah lebih baik yang menandakan berhasilnya pemerintah membangun daerah tersebut. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari upaya pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diraih dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Sukirno, akibat semakin majunya aktivitas perekonomian adalah bertambahnya produksi barang dan jasa serta peningkatan barang dan jasa untuk kemakmuran masyarakat. Sedangkan Menurut Amir, pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dikatakan mengalami perkembangan yang baik apabila terjadinya peningkatan berbagai sektor perekonomian yang mendukung perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan utama yang sangat diharapkan untuk dicapai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi pada setiap daerah. Dimana pembangunan ekonomi yaitu suatu bentuk usaha untuk mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan serta pengangguran, yang merupakan suatu proses multidimensi dalam konteks pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, dimana dalam hal ini dapat dilihat dalam skala kuantitatif dan diukur dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka

semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik (Styawan & Harsono, 2021).

Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku Utara, yang dimana sedang berupaya dalam melakukan pengembangan infrastruktur dan pembangunan. Untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di Kota Tidore kepulauan, peran pemerintah sangatlah diperlukan. Berbagai kebijakan kebijakan dibuat guna untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Untuk melihat dan mengetahui seberapa besar pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2013-2022, maka dapat dilihat pada data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di bawah ini :

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2022.



Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan

Pada gambar 1.1 diatas menunjukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di Kota Tidore Kepulauan dari tahun

2013-2022, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2013 PDRB di Kota Tidore Kepulauan mencapai 1.423.435,75 juta rupiah atau tumbuh sebesar 6,23%, ditahun 2014 PDRB terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 mencapai 1.687.144,57 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%, begitu juga pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang terus meningkat dan mencapai 2.012.275,71 juta rupiah atau tumbuh sebesar 6,12%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang mencapai 5,12%. Kemudian ditahun 2020, PDRB di Kota Tidore Kepulauan mencapai 2.033.844,56 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,07%, hal ini diakibatkan karena adanya penurunan nilai produksi yang disebabkan oleh pandemi covid-19 sehingga pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan kebijakan pembatasan social. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga 2022 PDRB mencapai 2.123.546,27 juta rupiah atau tumbuh sebesar 3,09%. Masalah ini menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam, prasarana penunjang relatif sama dengan Kabupaten/Kota lain.

Salah satu penentu keberhasilan pertumbuhan ekonomi di level daerah terletak pada kapasitas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kapasitas APBD dapat menjadi cerminan atas kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Anggaran daerah diibaratkan sebagai sebuah alat perencanaan dan alat pengawasan mengenai pengeluaran dan penerimaan dimasa depan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu kesatuan yang didalamnya terdapat Belanja Daerah. Pada komponen Belanja Daerah, akan nampak seberapa besar porsi belanja modal

dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan publik (Styawan & Harsono, 2021).

Menurut Budiono dalam Styawan & Harsono, (2021), pengeluaran pemerintah terdiri dari dua yang dimana salah satunya yaitu pengeluaran dalam bentuk investasi pemerintah yang diperoleh dari belanja pembangunan atau belanja modal. Dimana belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Banyaknya aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah itu disebabkan tingkat belanja modal yang meningkat. Banyaknya aset tetap tersebut diharapkan mampu untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal termasuk dalam kategori belanja langsung pada APBD yang digunakan untuk membiayai pembangunan wilayah seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Belanja modal itu sendiri terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung/bangunan, jalan, irigasi dan bangunan dan belanja aset tetap lainnya . Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya adalah dengan merealisasikan anggaran belanja dengan tepat baik pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan ataupun untuk pengembangan usaha mikro kecil (Silaban, 2023).

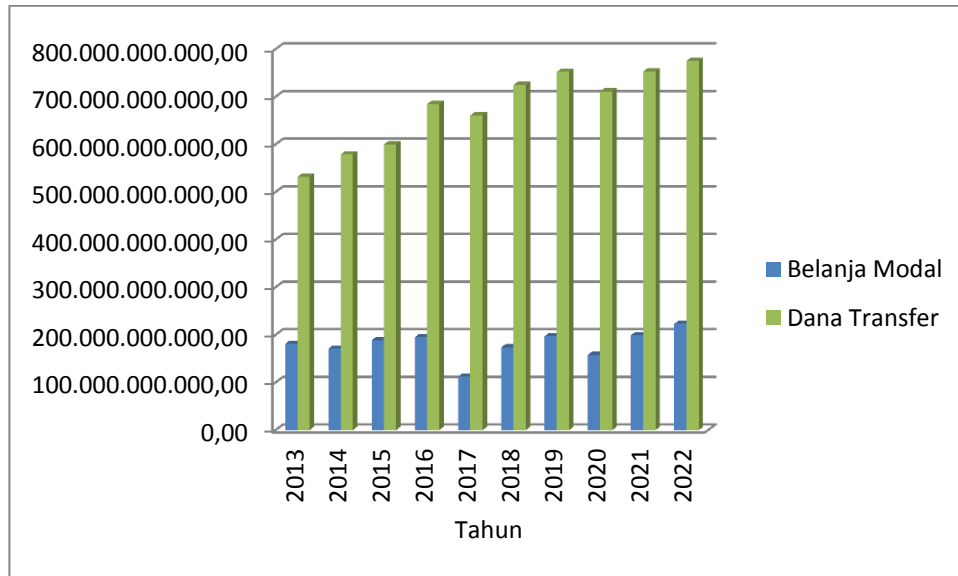
Pemberian otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah tersebut dalam membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah diikuti pula dengan adanya dana transfer yang diberikan kepada daerah yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana transfer yang bersumber dari APBN diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Mokoginta et al., 2023).

Selain itu, transfer dari pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah,. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan anggaran antar pemerintah dan juga memastikan bahwa semua daerah memenuhi standar pelayanan publik dengan baik. Dana transfer desentralisasi ini dilakukan dengan mekanisme dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Rahman et al., 2022). Penggunaan dana transfer yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peranan penting. Kemana dana perimbangan akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari dana perimbangan tersebut. Saat pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan alokasi ke belanja modal melalui pembangunan infrastruktur, maka dana perimbangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Hasan, 2015).

Demikian untuk mengetahui seberapa besar belanja modal dan dana transfer di Kota Tidore Kepulauan maka dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Modal dan Dana Transfer di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2022 (Milyar Rupiah).



Sumber : BPKAD Kota Tidore kepulauan

Pada gambar 1.2 diatas memperlihatkan belanja modal dan dana transfer di Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2013-2022. Terlihat bahwa belanja modal selalu mengalami peningkatan disetiap tahun terkecuali pada tiga tahun terakhir, yaitu ditahun 2014, 2017 dan 2020. Begitu juga dengan belanja operasi dan dana transfer. Pada tahun 2013 belanja modal di Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp180.687.276.503 dan menurun pada tahun 2014 sebesar Rp170.698.618.810, akan tetapi kembali peningkatan ditahun 2015 sampai 2016 sebesar Rp194.660.901.298 dan kembali menurun secara drastis sebesar Rp111.671.607.065 ditahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 belanja modal di Kota Tidore Kepulauan kembali mengalami peningkatan sebesar Rp196.597.221.969. Kemudian pada tahun 2020 kembali menurun sebesar Rp157.519.460.270. Setelah itu pada tahun 2021 dan 2022 belanja modal di Kota Tidore Kepulauan kembali mengalami peningkatan sebesar Rp222.807.459.284.

Selain belanja modal, dapat dilihat bahwa dana transfer pada tahun 2013 sebesar Rp531.496.530.824 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2016 sebesar Rp684.430.748.596. Akan tetapi menurun pada tahun 2017 sebesar 660.647.240.010 Selanjutnya pada tahun 2018 sampai tahun 2019 kembali meningkat sebesar Rp752.002.282.050 dan kembali menurun sebesar Rp710.976.813.869 ditahun 2020. Hal ini akibatkan karena adanya pandemi covid-19, sehingga diberlakukannya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi covid-19. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 dana transfer di Kota Tidore Kepulauan kembali mengalami peningkatan sebesar Rp775.190.848.524.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Waryanto, (2017) menyimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa ketika terjadinya peningkatan pada belanja modal maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Laodini et al., 2023), terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. sedangkan dana transfer berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, jika dilihat untuk alokasi belanja modal dan dana transfer di Kota Tidore Kepulauan selalu meningkat disetiap tahun, akan tetapi peningkatan tersebut belum bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Belanja Modal**

dan Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tidore Kepulauan". Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan?
2. Apakah dana transfer berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan serta informasi atau gambaran bagi penulis maupun pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan tentang belanja modal dan dana transfer dan pertumbuhan ekonomi
2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan dana transfer di Kota Tidore Kepulauan.
3. Sebagai bahan banding bagi para peneliti lain yang berkeinginan untuk melanjutkan penelitian ini di daerah yang sama ataupun di daerah yang berbeda.